

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Konsep**

##### **2.1.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah

kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Bantuan Langsung Tunai, atau disingkat BLT, adalah program bantuan pemerintah Dalam bentuk bantuan keuangan atau bentuk lain, baik bersyarat maupun atau diberikan tanpa syarat kepada orang miskin. Jumlah uang Mekanisme yang digunakan dalam program BLT disediakan secara berbeda Tergantung kebijakan pemerintah negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu BLT negara penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa uang, makanan, seperti asuransi kesehatan dan pendidikan. Tahap implementasi program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia seringkali diawali dengan sosialisasi dan verifikasi data, pembagian kartu, distribusi atau pencairan uang tunai, serta pembuatan laporan atau berita dan evaluasi. (Wikipedia, 2021: 1)

Sebelumnya BLT dianggap sukses pada tahun 2005 tepat setelah SBY dilantik menjadi presiden, lalu di wujudkan kembali pada tahun 2009 di saat musim pemilihan presiden. Hingga pada tahun 2013, kecurigaan kembali menguat keikaprogram BLT kembali dilakukan tepat menjelang musim pemilu. Hal ini sama seperti tahun 2009 lalu, hanya saja program tersebut ganti nama menjadi Banyuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Para pengamat pun mengtakan program BLT sebenarnya tidak dibutuhkan sebagai ganti rugi saat

melunjarkannya harga BBM, karena masyarakat Indonesia tidak terkena imbas berupa kesulitan ekonomi setelah kenaikan harga BBM. Program BLT

Pada tahun 2005, Layanan Bantuan Keuangan Langsung (BLT) diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada tahun-tahun berikutnya, BLT berlanjut, tetapi dengan nama lain, seperti 2008 dan 2013, dari BLT menjadi Bantuan Langsung Sementara (BLSM). BLSM merupakan alat berupa uang pemerintah untuk mengimbangi kenaikan harga minyak (BBM) yang berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Kemudian, pada tahun 2020 diluncurkan BLT sebagai upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Suari, 2021: 111).

#### A. Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin Pada Tahun 2005

Pemerintah mengesahkan undang-undang pengurangan subsidi BBM pada 2004 dan berlangsung hingga 2008. Akibat penggunaan BBM nonsubsidi, banyak subsidi digunakan oleh pihak nonsubsidi yang mengalami keterlambatan finansial, yaitu pihak-pihak yang mampu dan termasuk pihak industri. Subsidi ini akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya harga minyak dan akan berlangsung hingga tahun 2008. Dampak kenaikan harga minyak akan berdampak pada harga kebutuhan pokok. Sesuai dengan keputusan presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Miskin, maka dari itu dilaksanakannya program BLT yang merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak pada orang miskin dengan masa pelaksanaan program BLT hanya berlangsung satu tahun.

## B. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pada Tahun 2013

Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan harga BBM jenis premium dan solar dari harga Rp. 4.500 ( empat ribu lima ratus) menjadi Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus) untuk jenis premium dan Rp. 5.500 ( lima ribu lima ratus) per liter untuk jenis solar. Kenaikan harga BBM ini tentunya sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar-besaran, khususnya 17 bagi masyarakat atau keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT namun dengan sebutan yang berbeda, yaitu dikenal dengan sebutan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mekanisme BLSM sendiri, secara garis besar hampir sama seperti BLT. Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp. 3,8 triliun untuk program BLSM ini, dengan sasaran 18,5 juta keluarga miskin. Bantuan ini dibagikan per keluarga sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu) perbulan yang dilakukan selama empat bulan. Bantuan ini didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Dalam rangka penanggulangan pengurangan subsidi BBM, tujuan pemerintah melaksanakan program BLSM ini adalah :

1. Agar kebutuhan pokok masyarakat yang miskin dan rentan tetap terpenuhi
2. Mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat dari kenaikan harga BBM.
3. Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial bersama

### C. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada masyarakat, tidak hanya pada perawatan kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka peraturan ini menjadi sah. dasar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang tinggal di desa tersebut. BLT yang bersumber dari Dana Desa atau yang dikenal dengan BLT Dana Desa akan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung mulai April 2020 dengan sistem cashless atau tidak dengan langsung memberikan uang tunai (Suari, 2021:113).

#### **2.1.2 Sejarah Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Bantuan Langsung Tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah bantuan langsung tunai bersyarat yang di prakarsai oleh Luiz Inacio Lula da Silva, presiden Brasil yang ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai bantuan langsung tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26% penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini banyak ditiru oleh negara lain termasuk Indonesia ini sendiri.

### **2.1.3 Manfaat dan Kesuksesan Program BLT di Indonesia**

Meskipun program BLT di Indonesia sering dinilai memiliki banyak kelemahan, beberapa lembaga masih mengklaim program tersebut sukses. Bank Dunia melaporkan, Indonesia termasuk Negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan Negara lain. Hal ini mereka buktikan dengan laporan triwulanan ketiga pada tahun 2010. Dalam laporan itu mereka berkomentar pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan kepada sepertiga rumah tangga di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 5 bulan. Penyaluran ke keluarga sasaran di Indonesia juga dinilai tepat waktu oleh Bank Dunia, dan hal itu berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan menjadi insentif bagi yang tidak produktif.

Selain itu, Menteri Sosial, Bachtiar Hamzah juga menyatakan keberhasilan program BLT sebagai salah satu program yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin. Hal itu dia buktikan dengan bukti bahwa pada tahun 2007 warga miskin berjumlah 37 juta, namun berkurang pada tahun 2008 menjadi 35 juta warga miskin. Paskah Suzetta, kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), juga memuji keberhasilan program BLT. Menurutnya BLT dapat menjaga daya beli masyarakat dan melepas keterpurukan.

#### **2.1.4 Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai(BLT) untuk masyarakat miskin adalah :

1. Untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf kesejahteraan mereka.
2. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencarian selama pandemi Covid-19 agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
3. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 tersebut.

#### **2.2 TEORI**

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana kualitas hidup masyarakat sejahtera melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dan memaksimalkan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang ( termasuk di dalamnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi dalam pembangunan). Kesejahteraan sosial menurut Khan (Adi 2012, 23-24) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi terdisei atas kebijakan-kebijakan dan program-program yang dengan itu pemerintah menjamin suatu tingkat minimum tertentu untuk pelayanan-pelayanan sosial, uang, dan hak-hak konsumsi dengan menggunakan kriteria akses atau kriteria distribusi selain kriteria pasar.

Menurut Durham (dalam Suud 2006, 7), kesejahteraan sosial adalah sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Khan dan Durham ialah program-program atau pelaksanaan yang di buat oleh pemerintah untuk menolong masyarakat atau keluarga-keluarga yang masuk kriteria miskin. Program-program kesejahteraan sosial yang didistribusikan untuk kebutuhan hidup keluarga dan anak, kesehatan dan hak konsumsi.

Menurut Suharto (2006; 3) kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut (Suud 2006, 5) kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jamani, rohani, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja,

Menurut Friedlander (dalam Suud 2006, 8) kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapaitingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan lalu hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan warganya. Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan dan program untuk meningkatkan kehidupan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi warga yang membutuhkan.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip (dalam Suud 2006, 5) bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Menurut Midgley (dalam Suud 2006, 5) bahwa kesejahteraan sosial suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan ketiga setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur tersebut berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan seluruh masyarakat.

Menurut Wilensky dan Lebeaux (dalam Suud 2006, 7) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Menurut Wicked (dalam Suud 2006, 8) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

### **2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Fathkul Khoiriyah dkk berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro (Fatkhul dkk, 2020) menemukan bahwa permasalahan dalam program BST dan BLT-Dana Desa di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembaharuan data.

Penelitian (Hefis dan Iskandar, 2020) menemukan bahwa secara umum praktik pengelolaan dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa.

Penelitian (Ashilly Achidsti dkk, 2020) menemukan bahwa dalam implementasi aturan hukum tersebut, transparansi setiap tahap pendataan, penentuan KPM, hingga penyaluran BLT-DD yang melibatkan partisipasi berbagai pihak, khususnya masyarakat Desa Panggungharjo menjadi wujud monitoring bersama untuk menghindari penyelewengan penggunaan dana desa, sehingga dapat terhindar dari peluang adanya pungutan dari penentu KPM kepada KPM.

Penelitian (Arima Andhika Ayu dkk, 2020) menemukan bahwa program yang dilakukan bersama masyarakat Desa Jekawal dapat menangani pandemi saat

ini dan membangun masyarakat pinggiran kota, prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan Permendesa dan lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Penelitian (Binar Dwi dkk, 2020) menemukan bahwa penggunaan dana desa pada masa covid-19 di Kabupaten Sumbawa antara lain digunakan untuk pencegahan dan penanganan covid-19, untuk padat karya tunai desa, serta untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa).

Penelitian (Nuniek Dewi Pramanik, 2020) menemukan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padalarang kepada masyarakat sangat berpengaruh.

Penelitian (Selviana dkk, 2016) menemukan bahwa implementasi bantuan langsung tunai banyak mengalami kendala di pendataan seperti ada beberapa masyarakat yang tidak terdata dalam sasaran rumah tangga miskin serta tidak adanya sosialisasi pemerintah tentang bantuan langsung tunai hal inilah yang menyebabkan ada beberapa masyarakat yg berkategori miskin tidak menerima bantuan.

#### **2.4 Alur Pikir Penelitian**

Selama proses penelitian, peneliti membuat alur pikiran yang akan membantu untuk mempermudah tahapan yang akan dilakukan dari awal hingga akhir penelitian dalam proses penyusunan ini. Alur pikiran ini mengandung permasalahan yang ada dilapangan, teori yang digunakan dan tujuan dari penelitian alur pemikiran penelitian berfungsi sebagai pedoman berupa ringkasan

atau bagian secara umum mengenai masalah yang akan diteliti serta proses sampai akhir penelitiannya hingga mendapatkan apa yang di inginkan. Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Keluarga Miskin Selama Pandemi Covid-19 di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Identifikasi masalahnya :

1. Masyarakat miskin lainnya masih ada yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena data yang ada tidak tepat sasaran.
2. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sungai Dungun sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan BLT.

Gambar 2.1

## Kerangka Pikir Penelitian

